

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA

- JABATAN** : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Trantibum dan Linmas
Yang menjadi Wewenang daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten
- FUNGSI** :
1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bid. Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum
Dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 2. Pelaksanaan pembinaan umum di Bid Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum
Dan Ketentraman Masyarakat
 3. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
Unsur organisasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
 4. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas di Bid Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum
Dan Ketentraman Masyarakat
 5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di Bid Penegakan Produk Hukum, Ketertiban Umum
Dan Ketentraman Masyarakat
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi trantibum dan linmas
Sesuai ketentuan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITEIA
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
	Meningkatkan ketenteraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan ketenteraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	Wajib Otda	Satpol	Perbub No.06 Tahun 2010	Jumlah Kecamatan Dalam Keadaan Kondisi tentram dan Tertib ----- X 100 Jumlah Kecamatan Dalam Kabupaten Barito Kuala (17 Kec).	Bid. Trantibum	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
			2. Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA yang ditindak lanjuti	Wajib Otda	Satpol	Perbub No.06 Tahun 2010	jumlah pelanggaran PERDA ditindak lanjuti ----- X 100 Jumlah kasus	Bid PPHD	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Lidik Laporan Hasil
			3. Persentase Penanggulangan Kebakaran				Jumlah kebakaran ditangani ----- x 100 Jumlah kebakaran	Bid UPT Damkar	Kegiatan dari Kepala UPT Damkar

Kepala Satpol



M. ANUAR WJAYA, S.Sos
NIP. 19640424 198503 1 017

- JABATAN** : **Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**
- TUGAS** : Membantu dinas satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- FUNGSI** :
1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas
 2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional operasi, pengendalian dan pengembangan personil serta kerjasama dan kesamaptaan.
 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman Masyarakat	Persentase Kecamatan yang dilakukan pengawasan ketertiban dan ketentraman masyarakat secara berkala	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yg dilakukan pengawasan dan ketertiban}}{\text{Jumlah Kecamatan di Batola}} \times 100$	Bid. Tibum	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil

Kepala Satpol



M. ANJAR WJAYA, S.Sos
NIP. 19640424 198503 1 017

- JABATAN** : **Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah**
- TUGAS** : Membantu satuan menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang penegakan produk hukum daerah.
- FUNGSI** :
1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, yang meliputi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas.
 2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan
 3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan
 4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan.
 5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan.
 6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan.
 7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang penegakan produk hukum daerah.
 8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang penegakan produk hukum daerah.
 9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah.
 10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	Persentasi Kasus pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yg dtindak lanjuti}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100$	Bid. PPHD	Laporan Hasil Kegiatan dari Kasi Operasional dan Pengendalian

Kepala Satpol




M. ANJAR WJAYA, S.Sos
 NIP. 19640424 198503 1 017

JABATAN : **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.**

TUGAS : Membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberia bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidan satuan perlindungan masyarakat.

FUNGSI :

1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perlindungan masyarakat yang meliputi program dan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas
2. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
3. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
4. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
5. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
6. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional satuan perlindungan masyarakat dan bina kelembagaan kemasyarakatan
7. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang Perlindungan Masyarakat
8. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang Perlindungan Masyarakat
9. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat
10. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR FORMULASI/CARA PENGUKURAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya peran anggota Linmas dalam keamanan lingkungan	Persentase Desa yang Memiliki Anggota Linmas sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang dibina}}{\text{Jumlah Satlinmas di Batola}} \times 100$		

Kepala Satpol



M. ANJAR WIJAYA, S.Sos
NIP. 19640424 198503 1 017